

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Sinar Grafika.
- Atmosudirjo Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiman Rusli, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung, Hakim Publishing.
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, Ichtiar.
- H. Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, BumiAksara, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.
- N.M. Spelt dan J.B. JM. ten Berge, 2010, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*. Penerbit, PT. Grasindo. Jakarta.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 16.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan V, Liberty, Yogyakarta.

Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Sanapiah Faisal, 2005, *Fomat-Format Penelitian Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.5.

Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143K/20/MEM/2019 tentang Rencana umum ketenagalistrikan nasional tahun 2019 sampai dengan tahun 2038.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 94)

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706)

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100)

Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100)

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor.58/PPU-XII/2015 tanggal 22 September 2015.

Undang- Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor N1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 Yang Telah Dicitak Ulang)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor.58/PPU-XII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 September 2015.

D. Jurnal, Makalah, dan Pidato

Ahmad Roni Utomo dan Mochammad Rameli, 2012, “Perancangan dan Implementasi Metode Kontrol Optimal LQR untuk Pengendalian Frekuensi pada Simulator Pembangkit Listrik Generator”, Jurnal Teknik ITS, 1(1): 66-71.

Alfith, 2017, Optimalisasi ATS (Automatic Transfer Switch) pada Genset (Generator Set) 2800 Watt Berbasis TDR, Prosiding Seminar Nasional PIMIMD-4, ITP, Padang, hlm: .226-232.

Anugroho, Adhi., R. Lestarini, T.Hayati., 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagalistrikan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2) : 183-210.

Axella dan Suryani, 2012, Aplikasi Model Sistem Dinamik untuk Menganalisis Permintaan dan Ketersediaan Listrik Sektor Industri (Studi Kasus : Jawa Timur), JURNAL TEKNIK ITS, 1(1).

Saragih, Rapotan,. Djoko Sungkono Kawano , 2013, Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Premium, Pertamina, Pertamina Plus Dan Spiritus Terhadap Unjuk Kerja Engine Genset 4 Langkah Elektrolisis, e-jurnal Teknik Pomits 2(1), hlm 85-89.

Sjachran Basah, “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, makalah, Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995, hlm. 3.

Suharto, 2016, Analisis Penghematan Energi Listrik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Ditinjau Dari Desain Instalasi, Jurnal ELKHA, 8 (1).

Tumilar, Gabriel Paul., F. Lisi, M. Pakiding, 2015, Optimalisasi Penggunaan Bahan Bakar Pada Generator Set Dengan Menggunakan Proses Elektrolisis, E-journal Teknik Elektro dan Komputer, hlm: 77-88.

E. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Achmad, Dirga., 2018, *Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hidayat, A. M. N., 2020, *Penegakan Hukum Perizinan Reklame di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Jannah, Nur., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018, *Laporan akhir kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum terkait ketenagalistrikan*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

F. Internet

Dimas, "Perizinan di Pemda masih ribet",
"<https://www.radarbanten.co.id/perizinan-di-banten-masih-ribet/>
diakses 17 Agustus 2020 pukul 11:53 WIB

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energy Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Tugas dan Fungsi*,
<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/profil/visi-misi-&-tupoksi>, terakhir diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energy Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Lampiran SK Kepala Dinas PUP-ESDM DIY*, tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Layanan Informasi Publik.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, "Kebijakan Dan Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan", hlm.9
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/08619-sosialisasi-ppt-k2-24102019.pdf, diakses pada 4 September 2020.

Fatkhul Maskur, "Kementerian ESDM : 24 Pembangkit Listrik EBT Beroperasi Semester I 2020",
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200730/44/1273115/kementerian>

-esdm-24-pembangkit-listrik-ebt-beroperasi-semester-i-2020 ,
diakses pada 8 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Genset",
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/genset>, terakhir diakses pada
tanggal 6 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Perizinan",
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perizinan>, terakhir diakses pada
tanggal 19 Agustus 2020.

Mochammad Fachrudin, "Ini Bahayanya Gas Karbon Monoksida dari
Mesin Genset", [Republika.co.id](https://republika.co.id),
[https://republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/12/n0uj2o-ini-
bahayanya-gas-karbon-monoksida-dari-mesin-genset](https://republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/12/n0uj2o-ini-bahayanya-gas-karbon-monoksida-dari-mesin-genset), diakses pada
tanggal 17 Agustus 2020.

Pamungkas, Wisnu Wage, "Kerugian Kawasan Industri di Jabar Akibat
Pemadaman Listrik Lebih dari Rp200 Miliar",
[https://bandung.bisnis.com/read/20190808/550/1134227/kerugian-
kawasan-industri-di-jabar-akibat-pemadaman-listrik-lebih-dari-
rp200-miliar](https://bandung.bisnis.com/read/20190808/550/1134227/kerugian-kawasan-industri-di-jabar-akibat-pemadaman-listrik-lebih-dari-rp200-miliar), terakhir diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

PT. PLN (Persero), Pusat Pendidikan Dan Pelatihan, Keselamatan
Ketenagalistrikan,
[http://trustek.co.id/Dokument%20Uji/UU/Training%20K2%20dan%
20K3%20KESELAMATAN%20KETENAGALISTRIKAN%20RE
V.-1.pdf](http://trustek.co.id/Dokument%20Uji/UU/Training%20K2%20dan%20K3%20KESELAMATAN%20KETENAGALISTRIKAN%20REV.1.pdf), terakhir diakses pada 13 November 2020.